

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Sosiologi memandang isu gender sebagai isu yang serius, begitupun dengan Indonesia. Pada tahun 2022 lalu, Indonesia telah selesai melaksanakan presidensi W20 berbentuk *engagement group* yang bertujuan untuk mendorong isu pemberdayaan perempuan dapat diterjemahkan ke dalam bentuk deklarasi pemimpin sebagai sebuah bentuk kebijakan dan komitmen yang diharapkan dapat mendorong terciptanya kesetaraan gender. Ketua Bidang Luar Negeri Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) yang berperan sebagai *Chair Women20*, yakni Hadriani Uli Silalahi menyebutkan bahwa penyelenggaraan W20 di Indonesia merupakan salah satu bentuk tekad untuk menunjukkan Indonesia sebagai negara yang berkomitmen penuh untuk melakukan upaya kesetaraan dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan (W20 Indonesia Secretariat, 2022).

Melihat adanya komitmen yang kuat dari perempuan Indonesia untuk isu pemberdayaan perempuan, kadangkala kita masih harus merefleksikan diri terhadap bagaimana dinamika pelaksanaan kesetaraan gender di Indonesia. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyebutkan bahwa berdasarkan kalkulasi dari Gender Gap Report di tahun 2022, angka Gender Gap di Indonesia berada pada peringkat 92 dari 146 negara yang diukur berdasarkan tingkat partisipasi melalui sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan politik. Dalam hal ini diindikasikan terdapat kesenjangan hidup antara perempuan dan laki-laki. Jika gap nya masih terlihat tinggi maka masih diperlukan upaya untuk meningkatkannya (Rosalin, 2022, hlm. 34).

Data yang serupa mengenai kesetaraan gender dikemukakan oleh United Nations Development Programme (UNDP) melalui perhitungan *Gender Social Norm Index* (GSNI) tahun 2023. GSNI meninjau bagaimana norma sosial di masyarakat dapat menjadi bias gender dan menghambat perkembangan dunia. Perhitungan GSNI yang dilakukan melalui *World Values Survey* (WVS) di 91 negara dengan 81% populasi dunia ini menunjukkan sebanyak 69% responden di ranah politik berpendapat bahwa laki-laki di bidang politik dapat memimpin dengan baik dibandingkan perempuan, dan hanya sebanyak 27% yang menyebutkan bahwa

perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk berdemokrasi, kemudian di ranah ekonomi ditunjukkan sebanyak 46% laki-laki merasa berhak atas pekerjaan dibandingkan perempuan. Timpangnya angka tersebut memperlihatkan secara jelas bagaimana bias gender menjadi masalah universal (Hsu dkk., 2023, hlm. 8). Dalam hal ini, isu politik, ruang publik, dan pengambilan kebijakan menjadi nilai prioritas yang diperjuangkan dan tertuang ke dalam pembangunan global berupa Millenium Development Goals (MDG's) (Astuti dkk., 2019, hlm. 185).

Mengingat kenyataan bahwa kesetaraan gender yang masih saja timpang, masyarakat tentunya perlu sadar bahwa untuk keterlibatan perempuan dalam segala aspek kehidupan perlu untuk dipertimbangkan. Perempuan ialah manusia yang memiliki hak serupa dengan laki-laki; hak untuk mengenyam pendidikan, hak untuk mendapat kelayakan atas hidupnya, hak untuk merasa aman, dan hak-hak lainnya yang menjadi penunjang dalam kesehariannya (Subarkah & Tobroni, 2020, hlm. 8). Hanya saja stigma yang beredar di masyarakat mengenai perempuan masih sulit teratasi sehingga mengindikasikan adanya keterbatasan terhadap ruang gerak perempuan yang mengakibatkan perempuan sulit untuk menunjukkan kapasitas dirinya. Masyarakat di negara dengan indeks gender yang rendah tidak akan menyadari bahwa bias gender dapat mempengaruhi aspek-aspek lainnya seperti tingkat pendapatan dan budaya (Hsu dkk., 2023, hlm. 4).

Mengacu pada permasalahan yang terjadi, terdapat sebuah fenomena yang dinamakan *Masculine default*. *Masculine default* berangkat dari budaya peran gender yang membuat laki-laki dan perempuan ter-*intersectional*. *Masculine default* merupakan implementasi bias gender yang dimana peran gender milik laki-laki lebih dihargai, dianggap normal, dan menjadi standar dalam suatu tatanan di masyarakat. *Masculine default* ini mencakup ide, kebijakan, nilai, gaya interaksi, norma dan keyakinan yang secara bias tidak mendiskriminasi akan tetapi memiliki hasil yang merugikan perempuan dibandingkan dengan laki-laki (Cheryan & Markus, 2020, hlm. 65).

Karakteristik yang menjadi tolak ukur dari bagaimana *Masculine default* terimplementasi di masyarakat adalah sebagai berikut: (1) *Masculine default* menandai terjadi kekuasaan dan persaingan dengan stereotip yang dipegang bahwa

kepemimpinan itu diperankan oleh laki-laki, (2) komunikasi kepemimpinan politik akan lebih dihargai jika terdapat ketegasan, interupsi, pola bicara, dan modal sosial yang baik, sedangkan nilai-nilai tersebut telah lebih dahulu distereotipkan kepada laki-laki sebagai pihak superior, (3) seseorang merasa pantas mendapatkan apa yang ia dapatkan melalui mobilitas sosial secara vertikal ke atas, yang dimana jika berbicara mengenai mobilitas sosial akan lebih mudah dilakukan oleh laki-laki karena tersedianya akses yang luas, (4) terdapat keterkaitan dan keyakinan, pemikiran, sikap dan emosi dari anggota yang berkonotasi dengan karakteristik dari stereotip maskulin seperti kepercayaan diri dan manajemen resiko.

Penelitian terdahulu disampaikan oleh Lombard, Azpeitia, dan Cheryan (2021) dengan judul *Built on Uneven Ground: How Masculine Defaults Disadvantage Women in Political Leadership* dengan fokus subjek pada sektor politik di Amerika Serikat. Pada penelitian ini ditemukan enam bentuk *Masculine Default* yang terjadi pada sektor politik, diantaranya: (1) Kekuasaan dan persaingan yang kompetitif seringkali dimenangkan oleh laki-laki, (2) Pola komunikasi yang memberi penilaian lebih terhadap ketegasan dan kemampuan *personal branding* yang dapat memberikan pengaruh partisipasi verbal perempuan, (3) Rasionalitas yang memberikaan stereotip bahwa perempuan cenderung menggunakan emosinya sehingga perempuan diharapkan lebih hati-hati dalam menampilkan emosinya, (4) Norma pekerja ideal yang berbentuk sikap memprioritaskan pekerjaan diatas segalanya. Keseluruhannya menjadi *Masculine default* mengingat akses perempuan yang terbatas dan peran ganda perempuan yang diberikan oleh masyarakat sebagai *full timer* ibu rumah tangga (Lombard et al., 2021, hlm. 14).

Pemberdayaan perempuan bisa dimulai dari lingkup terkecil dalam kehidupan masyarakat. Upaya yang dapat ditempuh dalam membangun partisipasi politik terhadap perempuan ialah pendidikan politik yang bermula dari keluarga, melibatkan diri dalam aktivitas keorganisasian, dan advokasi politik (Priandi & Roisah, 2019). Diantara upaya yang disajikan, aktivitas keorganisasian menjadi salah satu upaya yang efektif. Melalui aktivitas keorganisasian, seseorang akan merubah pola pikir, sikap, hingga perilaku (Ainanur & Tirtayasa, 2018, hlm. 23).

Dalam dunia kemahasiswaan, dikenal sebuah organisasi yang bernama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). HMI telah ada sejak dalam waktu yang lama,

karena HMI lahir pada tanggal 5 Februari tahun 1947. HMI dengan misinya untuk menjadi kader milik umat bangsa bermaksud untuk menjawab problematika dalam isu keperempuanan dan kesetaraan gender, dalam hal ini terbentuklah sebuah wadah bagi kader perempuan HMI yang bernama Korps HMI-Wati atau KOHATI. KOHATI berbentuk lembaga yang dimaksudkan untuk membentuk keseimbangan ruang gerak perempuan dalam bentuk publik (Budi & Warsono, 2021, hlm. 19). Dilain pada itu, dengan tujuan yang berbunyi “Terbinanya Muslimah Berkualitas Insan Cita” menjadikan KOHATI sebagai tempat untuk mengembangkan potensi perempuan dalam berorganisasi dan berpolitik. KOHATI merupakan lembaga yang unik dengan sifat yang semi otonom. KOHATI berjalan secara *ex-officio* yang dimana pada kondisi internal HMI, KOHATI merupakan bidang yang berada dibawah naungannya dengan nama Bidang Pemberdayaan Perempuan (Bidang PP), sedangkan apabila dalam kondisi eksternal KOHATI merupakan organisasi tersendiri (Pangestu & Supratman, 2019, hlm. 42).

Berdasarkan perjalanan KOHATI dalam mempersiapkan kader-kader terbaik, KOHATI memiliki sistem pengkaderan dengan nama Latihan Kader KOHATI (LKK). LKK dalam KOHATI memberikan muatan-muatan kekohatian, keperempuanan, dan keorganisasian, seperti: kepemimpinan, manajemen organisasi, analisa kebijakan berbasis perempuan, hingga muatan-muatan lain seperti kewirausahaan (Pangestu & Supratman, 2019, hlm. 33). Sistem pengkaderan akan memperlihatkan kondisi baik dan buruk dari sebuah kelanggengan organisasi, serta menjadi tolak ukur dari keseriusan anggota organisasi hingga pengkaderan dianalogikan sebagai jantung organisasi (Cholis, 2021, hlm 53). Hanya saja dengan segala sistem yang berlaku, masih ditemukan dasar-dasar *masculine default* dalam perjalanan politik organisasi KOHATI bersama HMI. Hal ini dibuktikan dengan observasi yang dilakukan sebagai pra-penelitian dengan menggunakan teknik wawancara kepada salah satu anggota KOHATI yaitu Elwi perempuan yang berusia 22 tahun, pada 6 Maret 2023:

“KOHATI dengan sistem ex-officio ini menempatkan KOHATI dalam posisi di HMI pada bidang pemberdayaan perempuan. Hal ini menimbulkan interaksi antara HMI dan KOHATI. Hal janggal biasa ditemukan ketika masa pencalonan ketua KOHATI, dimana para pimpinan HMI dirasa ikut campur untuk ikut menentukan kader mana yang akan diusung, dan biasanya mereka beranggapan bahwa apabila kadernya yang terpilih akan

mempermudah mereka mengendalikan KOHATI. Kemudian jika berbicara mengenai keterlibatan KOHATI dalam partisipasi politik tentunya belum terlalu banyak, diketahui terdapat beberapa orang saja dan hal ini tentunya akan kalah jumlah bila disandingkan dengan kader dari HMI yang melanjutkan ke dunia politik” (Sumber: Elwi, Wawancara Maret 2023).

Hal di atas selaras dengan penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Budi & Warsono (2021, hlm. 41) dengan judul Konstruksi Kesetaraan Gender dalam Pengurus KOHATI Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Jawa Timur Periode 2018-2020. Pada penelitian tersebut, pengurus KOHATI memiliki kepekaan terhadap kesetaraan gender yang perlu terwujud dalam ruang publik, anggota KOHATI pun sepenuhnya menyadari terhadap konstruksi sosial yang menempatkan perempuan dalam lingkup terkecil di masyarakat. Perempuan dan laki-laki perlu dalam mencapai kesetaraan, maka terdapat berbagai upaya yang dapat ditempuh, seperti: (1) meningkatkan kualitas pengetahuan, (2) memiliki kemampuan untuk memimpin, (3) memiliki kecakapan dalam menerapkan prinsip-prinsip manajemen, (4) mengedepankan kemandirian dalam pengelolaan emosional dan spiritual.

Partisipasi kolektif perempuan yang terhimpun dalam gerakan sosial seperti organisasi akan membawa dampak baik bagi perempuan itu sendiri. Seperti pada penelitian yang dikemukakan oleh Yandy dan Mustajab (2021, hlm. 53) dengan tajuk Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia. Pergerakan perempuan dalam partisipasi politik secara kolektif telah terjadi sejak tahun 1955 yang dimana perempuan memilih untuk bergabung ke dalam partai politik dan menghasilkan pengesahan undang-undang No. 80 tahun 1958, yang dilanjutkan pada masa orde baru partisipasi politik perempuan menjadi hal yang menarik karena berimplikasi kepada banyaknya kebijakan politik yang dibuat oleh dan untuk perempuan namun mengarah pula kepada sebuah pembangunan negara. Tingkat konsistensi peran perempuan dalam politik harus tetap dilestarikan untuk menghapus stigma dan meningkatkan eksistensi terhadap perempuan untuk menjadi rekan strategis dalam dunia politik (Yandy & Mustajab, 2021, hlm. 56).

Dalam konteks partisipasi politik organisasi yang dimiliki oleh anggota KOHATI ini, fenomena *Masculine default* dapat menghambat partisipasi politik perempuan. Tentunya KOHATI sebagai organisasi perempuan memiliki peran

penting dalam memperkuat pondasi partisipasi politik perempuan dalam menghadapi stereotip yang masih melekat di masyarakat, dengan KOHATI Cabang Bandung yang memiliki letak lokasi strategis sebagai pusat administrasi Jawa Barat tentunya akan menjadi tolak ukur untuk cabang-cabang lainnya.

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengkaji lebih dalam mengenai fenomena *Masculine default* dalam partisipasi politik anggota KOHATI, apakah proses partisipasi tersebut dilatarbelakangi oleh langgengnya paham patriarki sehingga menyurutkan semangat anggota, mengingat banyaknya upaya yang dilakukan KOHATI dan salah satunya adalah penerapan LKK. Penelitian ini dapat menjadi media edukasi bagi perempuan bahwa paham *Masculine default* bukanlah penghalang untuk perempuan berkembang. Dengan begitu, perempuan dapat memperoleh hak-hak dan kesempatan yang setara dengan laki-laki tanpa adanya intervensi dan tanpa adanya pembatasan-pembatasan tertentu.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka peneliti mendapatkan rumusan masalah utama dalam penelitian yaitu “Bagaimana fenomena *Masculine default* dapat terjadi dalam kegiatan partisipasi politik anggota KOHATI Cabang Bandung?”. Agar penelitian dapat berfokus pada pokok permasalahan, maka disusun sejumlah rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimana proses identifikasi dari fenomena *Masculine default* yang terjadi pada anggota KOHATI Cabang Bandung?
- 2) Bagaimana dampak dari *Masculine default* terhadap kegiatan partisipasi politik anggota KOHATI Cabang Bandung?
- 3) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh anggota KOHATI Cabang Bandung dalam mengembangkan keterampilan partisipasi politik anggota?

1.3 Tujuan Penelitian

1) Tujuan Umum

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk dapat menganalisis Fenomena *Masculine default* yang terjadi dalam kegiatan partisipasi politik anggota KOHATI Cabang Bandung

2) Tujuan Khusus

Selain tujuan umum di atas, penelitian ini memiliki tujuan khusus sesuai dengan pembatasan dalam rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan khusus dalam penelitian ini ialah:

- a) Mengidentifikasi bentuk *Masculine default* yang terjadi di KOHATI Cabang Bandung.
- b) Mengidentifikasi dampak yang didapatkan oleh anggota KOHATI Cabang Bandung mengenai *Masculine default*.
- c) Mengidentifikasi upaya yang dilakukan oleh KOHATI Cabang Bandung.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan mampu memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1) Manfaat Teoretis

Mampu memberikan referensi baru mengenai fenomena *Masculine Default* terhadap kesiapan anggota KOHATI Cabang Bandung untuk terlibat dalam partisipasi politik. Kemudian memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan terkhusus keilmuan sosiologi sebagai kajian dalam mata kuliah sosiologi gender dan interaksi sosial. Sehingga mampu mewujudkan lingkungan sosial dengan perspektif *gender equality*.

2) Manfaat Kebijakan

Secara kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai pengetahuan mengenai urgensi kesetaraan gender di kehidupan masyarakat dan sekaligus memberikan pengingat bahwa kesetaraan gender termasuk ke dalam pembangunan keberlanjutan yang diinisiasi

oleh PBB agar terciptanya ruang yang setara terutama dalam pemerolehan kesempatan bagi semua pihak.

3) Manfaat Praktis

- a) Bagi Program Studi Pendidikan Sosiologi, memberikan informasi mengenai fenomena *Masculine Default* terhadap kesiapan anggota KOHATI Cabang Bandung untuk terlibat dalam partisipasi politik yang menjadi medium baru bagi perempuan serta melalui kajian ini dapat mewujudkan keilmuan yang berperspektif *gender equality*.
- b) Bagi Peneliti sebagai Mahasiswa Pendidikan Sosiologi, dapat memahami realitas sosial mengenai konstruksi sosial terhadap fenomena *Masculine Default*, sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberikan kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang menghalangi perempuan untuk berkontribusi serta mewujudkan kesetaraan gender untuk kepentingan masyarakat.
- c) Bagi Universitas Pendidikan Indonesia, penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi universitas dalam mengkaji kultur nilai-nilai patriarki sebagai bentuk upaya dalam menciptakan lingkungan yang ramah gender dengan mengindahkan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.
- d) Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan mampu menjadi pendorong bagi pemangku kebijakan untuk mengikutsertakan perempuan dalam penentuan kebijakan yang menjadi bentuk keberpihakan terhadap perempuan.
- e) Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan menjadi rekomendasi untuk memberikan kesadaran masyarakat terhadap isu kesetaraan gender dengan merekonstruksi stigma perempuan dengan kebebasannya dalam berekspresi sebagai bagian dari masyarakat.

4) Manfaat Aksi Sosial

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menjadi nyala api bagi seluruh perempuan untuk menyadari betapa pentingnya eksistensi perempuan di

masyarakat dan bagaimana setiap suara serta langkah yang diambil oleh perempuan akan turut serta memajukan sebuah bangsa.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Proposal skripsi ini terbagi menjadi lima bab yang saling berkesinambungan. BAB I sebagai Pendahuluan berisikan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi. BAB II sebagai Kajian Pustaka berisikan mengenai teori dan konsep yang relevan. BAB III sebagai Metode Penelitian berisikan mengenai bagaimana penelitian akan dilakukan dengan mencantumkan desain penelitian, partisipan dan lokasi penelitian, pengumpulan data, analisis data, validitas, dan isu etik. BAB IV sebagai Temuan dan Pembahasan berisikan mengenai hasil temuan yang dari penelitian dan pembahasan yang ditujukan untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian. BAB V sebagai Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi berisikan tentang penjabaran makna yang didapatkan oleh peneliti dan memberikan rekomendasi dari apa yang telah didapatkan.